

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak masa pendudukan Belanda, Pulau Jawa telah menjadi pusat pemerintahan dan kekuasaan, status yang masih disandang pulau Jawa sampai saat ini. Selain sebagai pusat kegiatan pemerintahan, Pulau Jawa juga menjadi pusat kegiatan ekonomi serta pusat kegiatan masyarakat lainnya, sehingga membuat terjadinya peningkatan jumlah penduduk yang cukup besar. Maka tidak heran jika sebagian besar penduduk Indonesia terkonsentrasi di pulau tersebut yang berakibat pada kelebihan penduduk.

Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali akan berakibat pada munculnya masalah-masalah kependudukan. Masalah ini menjadi masalah serius yang dihadapi sejak masa pemerintahan kolonial Belanda sampai dengan sekarang. Masalah-masalah tersebut menyangkut ketersediaan pangan, kemiskinan, penyakit, hingga lapangan pekerjaan. Perkembangan penduduk tanpa disertai dengan kontrol untuk mengatur jumlah penduduk yang diinginkan, hanya akan menimbulkan masalah sosial dan ekonomi dengan segala akibatnya.¹

Anggapan kelebihan penduduk sendiri telah mencuat dan membuat cemas pemerintah kolonial. Thomas Stamford Raffles sebagai penguasa Inggris di Jawa pada waktu itu, mengemukakan gejala kelebihan penduduk di Pulau Jawa dan

¹ Patrice Levang, *Ayo Ke Tanah Sabrang: Transmigrasi di Indonesia*, (Jakarta: Kepustakaan Ppopler Gramedia, 2003), hlm. 7.

melihat pulau-pulau di luar Jawa sebagai daerah penerima kelebihan penduduk tersebut. Selain Raffles, Gubernur Hindia Belanda Du Bus de Gisignies juga telah mencemaskan kelebihan penduduk di Pulau Jawa yang akan berdampak pada kepadatan hingga terbatasnya lahan. Kedua pandangan yang membuat cemas dan mempengaruhi kebijakan pemerintah Hindia Belanda.²

Pada awal abad ke-20, pemerintah Hindia Belanda mulai menyadari kemiskinan yang sedang meningkat di Pulau Jawa. Hal ini tidak terlepas dari peningkatan kepadatan penduduk yang berakibat pada tingkat kesejahteraan penduduk Jawa. Selain itu, aktivitas perusahaan-perusahaan asing berdampak buruk pada kehidupan penduduk pedesaan Jawa. Untuk itu, pemerintah Hindia Belanda membuat kebijaksanaan baru untuk memperbaiki kondisi rakyat pedesaan Jawa, yakni politik etis. Salah satu kebijakan politik etis adalah pemindahan penduduk Jawa melalui program *kolonisatie*.³

Pada tahun 1905, program kolonisasi (*kolonisatie*) untuk pertama kali dilaksanakan, dipimpin oleh Asisten Residen Heyting dengan melakukan pemindahan penduduk Jawa sebanyak 155 kepala keluarga dari Karesidenan Kedu ke daerah Lampung, tepatnya di daerah Gedong Tataan. Desa koloni tersebut diberi nama Bagelen, yang dibangun dengan menggunakan pola dari Jawa, termasuk

² Sri-Edi Swasono, "Kependudukan, Kolonisasi, dan Transmigrasi" dalam *Sepuluh Windhu Transmigrasi di Indonesia: 1905-1985* oleh Sri-Edi Swasono dan Masri Singarimbun (ed.), (Jakarta: UI Press, 1985), hlm. 72.

³ *Kolonisatie* (Kolonisasi) merupakan program pemindahan penduduk oleh pemerintah Hindia Belanda yang erat kaitannya dengan kebijakan politik etis. Program ini memindahkan para petani dari daerah padat penduduk di pulau Jawa ke daerah kosong di luar pulau Jawa yang disebut dengan koloni. Joan Hardjono, *Transmigrasi dari Kolonisasi Sampai Swakarsa*, (Jakarta: Gramedia, 1982), hlm. 1.

didalamnya struktur pemerintahan dan sistem pertaniannya. Sehingga, membuat desa tersebut berbeda dari daerah sekitarnya yang merupakan masyarakat adat setempat. Hingga tahun 1911 telah dibangun empat desa lainnya dengan seluruh keperluan dan biaya hidup mereka ditanggung oleh program tersebut selama dua tahun.⁴ Selain ditujukan untuk mengurangi kelebihan penduduk yang ada di pulau Jawa, pelaksanaan kolonisasi oleh pemerintah Hindia Belanda juga ditujukan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dengan biaya murah bagi pengembangan perusahaan-perusahaan kapitalis Belanda dan asing, terutama di Pulau Sumatera.⁵

Tahun 1905 hingga 1927 menjadi masa percobaan dari program kolonisasi ini. Dalam kurun waktu tersebut, pemerintah Hindia Belanda telah melakukan beberapa kali percobaan dengan memindahkan penduduk Jawa ke daerah luar Jawa. Pada tahun 1921, pemerintah Hindia Belanda mengirimkan penduduk yang berasal dari Wonosobo ke daerah Way Semangka di dekat Kota Agung Lampung Selatan, desa yang didirikan diberi nama sesuai dengan tempat asal mereka.⁶ Program kolonisasi ini mencapai puncaknya pada tahun 1942, dan setelah itu tidak ada kelanjutan dari program tersebut. Kemudian, setelah kemerdekaan Republik Indonesia, program ini berganti nama menjadi program transmigrasi seperti yang kita ketahui hingga saat ini.

⁴ Patrice Levang, *op.cit.*, hlm. 10.

⁵ Sri-Edi Swasono, *op.cit.*, hlm. 76.

⁶ Slamet Purboadiwidjojo, "Mencari Suatu Sistem untuk Melaksanakan Pemindahan Penduduk Secara Besar-Besaran" dalam Sri-Edi Swasono dan Masri Singarimbun (ed.), *op.cit.*, hlm. 10.

Bengkulu menjadi salah satu pilihan daerah tujuan sejak program kolonisasi oleh pemerintah kolonial Belanda, selain Lampung. Bengkulu memiliki lahan yang luas dengan penduduk pribumi yang dapat menerima pendatang menjanjikan kehidupan yang lebih baik bagi para kolonis dari Jawa. Para kolonis tersebut ditempatkan pada beberapa daerah di Bengkulu pada saat itu, termasuk salah satunya di wilayah Rejang Lebong. Pada tahun 1908 oleh pemerintah Hindia Belanda dikirimkan migran kolonisasi pertama ke Bengkulu. Kolonis ini adalah orang-orang Sunda yang berasal dari Bogor, Sukabumi, dan Tasikmalaya dengan jumlah 122 orang. Mereka dibagi menjadi tiga kelompok yang masing-masing ditempatkan di Air Lembut untuk bekerja di perkebunan tembakau, dua kelompok lainnya ditempatkan di Kebon agung dan di Talang Benih untuk membuka lahan persawahan bekerja sama dengan penduduk setempat. Pada masa percobaan kolonisasi di Bengkulu tahun 1908 sampai sekitar tahun 1919, kebanyakan dari peserta program ini adalah orang Sunda.⁷

Setelah sempat dihentikan pada tahun 1927 dan diadakan evaluasi, program kolonisasi di Bengkulu kembali diselenggarakan pada tahun 1930 dengan mayoritas pesertanya adalah orang Jawa. Berdasarkan hasil penelitian, Bengkulu dinilai kurang cocok untuk program kolonisasi dikarenakan kondisi alamnya. Namun, dikarenakan keberhasilan program kolonisasi yang telah berjalan, ketersediaan

⁷ Lindayanti, "Menuju Tanah Harapan: Kolonisasi Orang Jawa di Bengkulu," *Humaniora*, Vol. 18 No. 3, 2006., hlm. 301.

lahan, dan adanya kerjasama dengan penduduk asli, Bengkulu masih menjadi salah satu daerah tujuan program kolonisasi baru hingga tahun 1941.⁸

Setelah kemerdekaan, wilayah Kabupaten Rejang Lebong masih menjadi bagian dari provinsi Sumatera Selatan, termasuk Bengkulu yang masih menjadi keresidenan. Barulah pada tahun 1968, status Bengkulu ditingkatkan menjadi provinsi. Program transmigrasi di Rejang Lebong mulai dilaksanakan kembali pada tahun 1968. Sampai dengan tahun 2000, setidaknya terdapat tiga jenis program transmigrasi yang di tempatkan di Rejang Lebong, yaitu Transmigrasi Angkatan Darat, Transmigrasi Umum, dan Transmigrasi Swakarsa.

Program transmigrasi oleh pemerintah mulai berjalan pada tahun 1968. Program transmigrasi tersebut terbagi menjadi dua jenis, yakni Transmigrasi Umum dan Swakarsa. Keduanya memiliki perbedaan terletak pada biaya yang dikeluarkan, yakni pada transmigrasi swakarsa yang menggunakan biaya sendiri tetapi masih tetap diatur oleh pemerintah. Proyek transmigrasi di Rejang Lebong dimulai dengan ditematkannya transmigran sebanyak 200 kepala keluarga (KK) di daerah Blumai, Padang Ulak Tanding pada kurun waktu 1968-1973. Selanjutnya, pada tahun 1982, transmigran yang berasal dari provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur melalui program transmigrasi umum diletakkan di daerah Mangkuraja. Pada tahun 1983, hanya dilakukan pemindahan penduduk lokal, sedangkan pada tahun 1984, program transmigrasi swakarsa mulai

⁸ *Ibid.*, hlm. 305.

dilaksanakan dengan ditempatkannya sejumlah transmigran pada proyek Air Kati dan Kota Padang berdampingan dengan program transmigrasi umum..⁹

Pada kurun waktu 1985 sampai 1989, program transmigrasi oleh pemerintah sempat terhenti dan dilanjutkan kembali pada tahun 1990. Program transmigrasi selanjutnya lebih berorientasi pada program transmigrasi swakarsa pengembangan desa potensial (Transbangdep), sedangkan program transmigrasi umum tercatat hanya dua kali penempatan sampai dengan tahun 1997. Hingga tahun 2000, jumlah penduduk yang mengikuti program transmigrasi pemerintah berjumlah 2.078 kepala keluarga atau mencapai 8.780 jiwa. Kehidupan para transmigran bukan tanpa hambatan, mereka harus beradaptasi dengan kondisi dan lingkungan yang baru. Tidak sedikit dari mereka yang pada akhirnya memilih kembali ke daerah asalnya ataupun pindah ke daerah lainnya. Banyak hal yang melatarbelakangi kepulangan mereka, seperti kondisi lingkungan yang tidak cocok, fasilitas yang kurang, jauh dari pusat kota, hingga alasan keamanan. Mereka yang memilih tinggal, hidup berdampingan dan berintegrasi dengan penduduk setempat dengan kultur budaya yang berbeda.

Sementara itu, pada tahun 1974, dilakukan transmigrasi di Kabupaten Rejang Lebong dengan pesertanya merupakan anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) yang ditempatkan di Air Bening. Transmigrasi ini dikenal dengan nama Transmigrasi Angkatan Darat (Trans-AD). Para transmigran tersebut berasal dari 4 Kodam, yaitu Kodam Sriwijaya, Kodam Siliwangi, Kodam

⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong, *Rejang Lebong dalam Angka tahun 1990*, hlm. 53.

Diponegoro, dan Kodam Brawijaya. Peserta transmigrasi ini merupakan para anggota TNI AD yang sudah memasuki masa pensiun, namun ada juga yang masih aktif bertugas.¹⁰

Kabupaten Rejang Lebong menjadi salah satu wilayah yang menjadi tujuan program perpindahan penduduk pemerintah. Hal ini membuat penulis memiliki keinginan untuk meneliti lebih dalam mengenai program transmigrasi di Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 1968 hingga 2000 dan kehidupan para transmigran setelah ditempatkan di lokasi transmigrasi. Seperti yang diketahui sebelumnya, Rejang Lebong telah menjadi daerah tujuan program transmigrasi sejak masa pemerintahan Hindia Belanda. Oleh karena itu, tulisan ini hadir untuk dapat lebih menjelaskan mengenai program transmigrasi beserta kehidupan para transmigran setelah tinggal dan menetap di Kabupaten Rejang Lebong.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, disini penulis lebih memfokuskan pembahasan pada satu rumusan masalah, agar penulisan ini menjadi lebih sistematis dan kronologis. Adapun rumusan masalah tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program transmigrasi yang diselenggarakan di Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 1968-2000?
2. Bagaimana kehidupan para transmigran setelah menempati wilayah Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 1968-2000?

¹⁰ Wawancara dengan Agus Purnomo, tanggal 13 Maret 2021, di Kelurahan Talang Ulu, Kec. Curup Timur.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, adapun tujuan dari penelitian ini, *pertama* untuk menjelaskan pelaksanaan program transmigrasi yang diselenggarakan di kabupaten Rejang Lebong sejak tahun 1968-2000. *Kedua*, untuk menjelaskan bagaimana kehidupan para transmigran setelah menempati wilayah Kabupaten Rejang Lebong.

Penulis berharap tulisan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya. Bagi historiografi penulisan sejarah Kabupaten Rejang Lebong, tulisan ini dapat memberikan informasi-informasi baru yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian dan penulisan yang dilakukan oleh peneliti atau sejarawan, terutama berkaitan dengan sejarah transmigrasi di Kabupaten Rejang Lebong. Tulisan ini diharapkan juga dapat memberikan kontribusi dalam khazanah sejarah Indonesia.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam sebuah penulisan sejarah, tentu didalamnya penulisannya terdapat batasan-batasan masalah, sehingga kajian yang dibahas menjadi lebih focus dan hasil penulisan tersebut menghasilkan fakta-fakta sejarah baru, bukan hal-hal umum yang sudah ada sebelumnya. Pembatasan ini juga dimaksudkan untuk mempermudah seorang sejarawan dalam melakukan penelitian serta mempermudah pembaca dalam memahami hasil dari penelitian sejarah tersebut.¹¹

¹¹ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), hlm. 91.

Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana pelaksanaan program transmigrasi yang dilaksanakan di kabupaten Rejang Lebong. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, wilayah Rejang Lebong sudah menjadi daerah tujuan transmigrasi sejak zaman Hindia Belanda. Pada masa Orde Baru, terdapat tiga program transmigrasi yang dilaksanakan di kabupaten Rejang Lebong yakni Transmigrasi Umum, Transmigrasi Swakarsa, dan Transmigrasi Angkatan Darat.

Dipilihnya Rejang Lebong sebagai batasan wilayah penulisan, selain kedekatan emosional penulis, Rejang Lebong merupakan salah satu wilayah di Provinsi Bengkulu yang memiliki kondisi tanah yang subur sehingga sangat cocok untuk kegiatan pertanian. Pada beberapa wilayah kecamatannya, masih banyak lahan potensial yang belum dimanfaatkan secara maksimal oleh penduduk setempat. Dengan kehadiran transmigran diharapkan dapat memanfaatkan potensi lahan tersebut, terutama untuk aktivitas pertanian dan perkebunan. Kondisi yang ada dimiliki Rejang Lebong ini sangat cocok dengan karakteristik masyarakat pulau Jawa yang agraris. Oleh karena itu, adanya program transmigrasi dapat lebih memaksimalkan potensi daerah.

Batasan temporal dalam penelitian ini adalah pasca kemerdekaan hingga Orde Baru atau dari tahun 1968 sampai dengan tahun 2000. Pengambilan batasan tahun tersebut untuk mengetahui pelaksanaan program transmigrasi di Kabupaten Rejang Lebong serta melihat bagaimana kehidupan sosial dan ekonomi setelah bermukim di daerah baru tersebut. Tahun 1968 dipilih karena pada tahun tersebut program transmigrasi dengan daerah tujuan Rejang Lebong mulai dilaksanakan kembali yang sebelumnya pernah menjadi daerah tujuan penempatan program

kolonisasi Belanda. Selain itu, terdapat pula proyek transmigrasi yang dilaksanakan oleh TNI AD yang dikenal dengan nama Transmigrasi Angkatan Darat (Trans-AD) pada tahun 1974.

Tahun 2000 oleh penulis dipilih sebagai batasan akhir tahun penelitian. Tahun tersebut dipilih karena program transmigrasi di Kabupaten Rejang Lebong pada tahun tersebut tercatat sudah tidak ada penempatan transmigran lagi. Pada masa Orde Baru, pemerintah dengan gencarnya melaksanakan program transmigrasi dengan tujuan pemerataan penduduk dan meningkatkan kegiatan ekonomi pada daerah tujuan. Pada akhir masa Orde Baru, krisis yang terjadi pada saat itu membuat beberapa program menjadi terganggu, termasuk salah satunya program transmigrasi.

1.5 Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa sumber pustaka untuk memperkaya kajian penelitian yang diteliti. Sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal. Beberapa tinjauan pustaka yang digunakan oleh penulis adalah:

Sumber pustaka yang membahas mengenai transmigrasi yang dilakukan adalah buku karya Joan Hardjono yang berjudul “*Transmigrasi: Dari Kolonisasi sampai Swakarsa*”.¹² Buku ini menjelaskan mengenai perpindahan penduduk pulau Jawa sejak zaman Belanda hingga Orde Baru. Sejak masa pemerintahan colonial Belanda sudah dilakukan pemindahan penduduk dari pulau Jawa yang ditujukan

¹² Joan Hardjono, *Transmigrasi: Dari Kolonisasi sampai Swakarsa*, (Jakarta: Gramedia, 1982).

untuk mengurangi penduduk di pulau Jawa, namun tujuan lain dilaksanakannya program ini adalah untuk memenuhi kekurangan tenaga kerja dengan upah yang murah, program ini dikenal dengan nama *koloniastie*. Program *kolonisatie* ini nantinya akan berganti setelah kemerdekaan dengan nama transmigrasi. Di dalam buku ini dijelaskan program transmigrasi yang memindahkan penduduk Jawa dan kehidupan mereka di negeri baru. Namun, di dalam buku ini sedikit pembahasan yang menyangkut Bengkulu ataupun Rejang Lebong sebagai salah satu tujuan transmigrasi, mengingat daerah tersebut sudah menjadi daerah tujuan sejak masa Hindia Belanda.

Referensi lainnya yang membantu dalam penelitian adalah buku “*Ayo ke Tanah Sabrang*” yang ditulis oleh Patrice Levang. Didalam buku tersebut membahas mengenai transmigrasi yang mengalami masa-masa gemilang dan masa suram, serta tingkat keberhasilan dan tingkat kegagalannya. Selain itu, didalamnya menjelaskan mengenai konsep dasar transmigrasi yang dinilai kurang sesuai. Konsep tersebut berupa kesalahan persepsi sehingga berdampak pada kesulitan yang dialami oleh para transmigran di beberapa proyek transmigrasi di Sumatera, Kalimantan, serta Sulawesi. Buku ini begitu banyak menyinggung aktivitas masyarakat transmigran, sehingga secara tidak langsung membantu penulis dalam mengetahui kehidupan para transmigran baik sebelum atau sesudah migrasi di beberapa wilayah di Indonesia.¹³

¹³ Patrice Levang, *Ayo ke Tanah Sabrang*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2003).

Buku karya Rukmadi Warsito dkk yang berjudul “*Transmigrasi dari daerah asal sampai benturan budaya di tempat pemukiman*” menjelaskan mengenai benturan, permasalahan, hingga konflik yang terjadi antara para transmigran dengan penduduk setempat. Permasalahan mengenai sertifikat tanah hingga permasalahan dengan penduduk setempat menjadi contoh permasalahan yang dihadapi oleh para transmigran. Dalam studi kasus di Rejang Lebong, permasalahan yang dihadapi oleh para transmigran terutama berkaitan dengan penduduk setempat lebih banyak dalam permasalahan tanah dan pengolahannya, serta keamanan. Banyak warga transmigran yang kehilangan barang akibat pencurian yang dilakukan oleh penduduk lokal. Hal ini membuat para transmigran tidak merasa nyaman dan tidak sedikit pula dari mereka yang memilih untuk kembali ke daerah asalnya.¹⁴

Selain itu, dijelaskan pula dalam buku H.J. Hereen yang berjudul “*Transmigrasi di Indonesia: Hubungan antara transmigran dan penduduk asli, dengan titik berat Sumatera Selatan dan Tengah*”. Buku tersebut menjelaskan mengenai sejumlah persoalan terkait dengan hubungan antara para transmigran dengan penduduk asli. Disebutkan bahwa dalam pemukiman transmigrasi benturan antara pendatang dengan penduduk setempat, bahkan dengan antar transmigran pun tidak dapat dielakkan. Selain itu, terdapat perbedaan sistem budaya yang dianut oleh masing-masing yang terlibat dalam program transmigrasi nantinya. Sehingga

¹⁴ Rukmadi Warsito, dkk., *Transmigrasi dari daerah asal sampai Benturan Budaya di Tempat Pemukiman*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1984).

peran dan kebijakan pemerintah akan sangat mempengaruhi keharmonisan di daerah transmigrasi.¹⁵

Buku “*Sepuluh Windu Transmigrasi di Indonesia 1905-1985*” oleh Sri Edi Swasono dan Masri Singarimbun berisikan mengenai perjalanan 80 tahun transmigrasi di Indonesia. Buku ini sendiri memuat 25 karangan yang ditulis oleh berbagai kalangan ahli transmigrasi. Buku ini membantu penulis, terutama pada beberapa tulisan didalam buku tersebut yang membahas berkaitan dengan pola permukiman, hubungan dengan penduduk setempat, pemanfaatan lahan, dan lain-lain. Beberapa hal tersebut dapat dihubungkan dengan kehidupan transmigran yang ada di Rejang Lebong.¹⁶

Selanjutnya adalah buku yang ditulis oleh Arief Budiman yang berjudul “*Transmigrasi di Indonesia: Ringkasan Tulisan dan Hasil-Hasil Penelitian*”. Buku ini berisikan mengenai ringkasan tulisan dan hasil penelitian yang diambil dari berbagai sumber yang membahas mengenai transmigrasi. Di dalam buku tersebut menjelaskan mengenai beberapa pola transmigrasi yang digunakan oleh pemerintah seperti pola transmigrasi umum, transmigrasi swakarsa, transmigrasi pertanian, transmigrasi pola perkebunan, dan lain-lain. Di Rejang Lebong, pola yang digunakan oleh pemerintah adalah pola transmigrasi umum dan swakarsa.

¹⁵ H.J. Heeren, *Transmigrasi di Indonesia: Hubungan antara Transmigran dan Penduduk Asli, dengan Titik Berat Sumatera Selatan dan Tengah*, (Jakarta: Gramedia, 1979).

¹⁶ Sri-Edi Swasono & Masri Singarimbun, *Sepuluh Windu Transmigrasi di Indonesia 1905-1985*, (Jakarta: UI Press, 1985)

Transmigrasi bukan hanya sebagai program pemindahan penduduk, tetapi upaya untuk mengembangkan wilayah tujuan.¹⁷

Selain itu, beberapa penelitian yang berkaitan dengan transmigrasi yang ditulis dalam bentuk jurnal seperti “*Perpindahan Penduduk dan Ekonomi Rakyat Jawa, 1900-1980*” oleh Soegijanto Padmo. Dalam jurnal tersebut disebutkan bahwa terjadi perubahan ekonomi yang berakibat pada perpindahan penduduk Jawa. Perpindahan tersebut merupakan fenomena ekonomi dan sosial dengan dorongan untuk mencari kehidupan ekonomi yang lebih baik. Jurnal ini juga membantu dalam menggambarkan keadaan ekonomi pada masa itu yang dapat dijadikan sebagai faktor pendorong migrasi.¹⁸

Jurnal lainnya merupakan penelitian dari Lindayanti dengan judul “*Menuju Tanah Harapan: Kolonisasi Orang Jawa di Bengkulu*”. Pada jurnal tersebut lebih banyak membahas mengenai kuli kontrak di beberapa perkebunan serta pertambangan Belanda yang ada di Bengkulu. Di dalamnya turut dibahas pula mengenai program *kolonisatie* yang ada di Bengkulu. Pada tulisan ini pembahasan mengenai perpindahan penduduk di Rejang Lebong terutama setelah kemerdekaan lebih banyak disinggung.¹⁹

1.6 Kerangka Konsep

¹⁷ Arief Budiman, *Transmigrasi di Indonesia: Ringkasan Tulisan dan Hasil-Hasil Penelitian*, (Jakarta: Gramedia, 1985).

¹⁸ Soegijanto Padmo, “Perpindahan penduduk dan Ekonomi Rakyat Jawa. 1900-1980”, *Humaniora*, No. 12, 1999.

¹⁹ Lindayanti, “Menuju Tanah Harapan: Kolonisasi Orang Jawa di Bengkulu,” *Humaniora*, Vol. 18 No. 3, 2006.

Pemerintah Indonesia melaksanakan program perpindahan penduduk atau yang dikenal dengan program transmigrasi. Pemindahan penduduk yang berkonsentrasi tinggi terutama di pulau Jawa menuju pulau lainnya seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua sebagai lanjutan program *kolonisatie* zaman Belanda. Program ini menjadi salah satu bentuk migrasi yang diatur dan dibiayai oleh pemerintah. Hal tersebut lah yang membedakannya dengan migrasi pada umumnya. Transmigrasi sendiri memiliki arti perpindahan penduduk dari daerah padat guna penyebaran penduduk agar lebih merata dan tidak terkonsentrasi di pulau Jawa. Sehingga, program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para transmigran dan masyarakat sekitarnya, peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Transmigrasi sendiri diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Transmigrasi.²⁰

Transmigrasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk memecahkan masalah kepadatan penduduk di Jawa. Seperti yang diketahui bersama, tingkat kepadatan penduduk di pulau Jawa terus meningkat setiap tahunnya sehingga akan memunculkan masalah penyempitan lahan pertanian dan lapangan pekerjaan, dan ini menjadi faktor terjadinya kemiskinan di pulau Jawa.²¹ Selain itu, untuk menjadi peserta transmigrasi juga diharuskan memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pemerintah. Karena pada saat di daerah tujuan, mereka

²⁰ Kementerian Desa, *Transmigrasi: Masa Doeloe, Kini, dan Harapan Kedepan*, (Jakarta: Ditjenpkp2trans, 2015), hlm. 2.

²¹ Rukmadi Warsito, *Transmigrasi dari Daerah Asal sampai Benturan Budaya di Tempat Permukiman*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1984), hlm. 10.

nantinya membuka lahan baru yang merupakan suatu pekerjaan yang berat. Mereka juga harus beradaptasi dengan daerah baru.

Secara garis besar, transmigrasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu transmigrasi umum dan transmigrasi swakarsa. Transmigrasi umum adalah transmigrasi yang keseluruhan biayanya, dimulai dari ongkos pemberangkatan hingga kebutuhan hidup selama kurang lebih satu tahun, kesemuanya ditanggung oleh pemerintah. Sedangkan, transmigrasi swakarsa adalah transmigrasi yang biaya pelaksanaannya ditanggung oleh para transmigran sendiri.²² Selain itu, terdapat beberapa bentuk transmigrasi lainnya yang diselenggarakan, seperti salah satunya adalah transmigrasi lokal, yaitu transmigrasi yang dilakukan hanya di pada wilayah provinsi tersebut yang diselenggarakan di beberapa provinsi.

Baik daerah asal ataupun daerah tujuan transmigrasi, keduanya memiliki faktor positif dan negative. Faktor positif adalah faktor yang memberikan nilai menguntungkan jika bertempat tinggal di daerah tersebut, sedangkan faktor negative diartikan sebagai faktor yang memberikan nilai tidak menguntungkan pada daerah tersebut. Jadi, para transmigran melakukan migrasi agar kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi. Apabila kebutuhan tersebut tidak dapat terpenuhi, maka seseorang dapat menjadi tertekan. Pada akhirnya membuat mereka akan pergi keluar dari daerah asalnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut.²³

²² Rukmadi Warsito, *op.cit.*, hlm. 2.

²³ Sosek Emalisa, "Pola dan Arus Migrasi di Indonesia", Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, 2003, hlm. 1-3. Makalah Tidak Diterbitkan.

Pada dasarnya terdapat dua pengelompokan faktor-faktor yang melatarbelakangi seseorang untuk bermigras, yaitu faktor pendorong dan faktor penarik. Beberapa persoalan yang menjadi pendorong transmigran dari daerah asal untuk melakukan migrasi yakni: *Pertama*, berkurangnya lahan pertanian sebagai akibat dari semakin bertambahnya penduduk. Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan berimplikasi pada ketersediaan lahan. Semakin besar jumlah penduduk, maka akan semakin banyak pula kebutuhan lahan untuk permukiman. *Kedua*, didorong karena faktor ekonomi. Terbatasnya kesempatan kerja dan kondisi ekonomi yang kurang di daerah asal membuat seseorang akan melakukan mobilitas ke luar dari daerah asalnya agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi.²⁴

Pada daerah tujuan juga terdapat faktor penarik penduduk untuk melakukan migrasi ke daerah tersebut. Ketersediaan lahan yang masih luas yang belum sepenuhnya dimanfaatkan menjadi salah satu faktor penarik untuk bermigrasi. Lahan-lahan kosong tersebut dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian bagi mereka, terutama oleh orang Jawa akan sangat menguntungkan bagi mereka. Jarak daerah tujuan bukan lah menjadi rintangan yang menghalang, namun tidak sedikit pula yang menjadikan hal tersebut sebagai penghalang. Bukan hanya berprofesi sebagai petani atau penggarap lahan saja, para transmigran tersebut juga bekerja pada sector lainnya seperti sector formal dan sector informal, terutama generasi kedua mereka.²⁵

²⁴ Priyono Tjiptoherijanto, "Mobilitas Penduduk dan Pembangunan Ekonomi", *Makalah Bappenas*, No. 20, hlm. 1-3.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 3.

Dalam penelitian ini, pokok bahasan lainnya adalah kehidupan sosial, ekonomi, serta budaya masyarakat transmigran setelah mereka tinggal dan menetap di Kabupaten Rejang Lebong. Tema yang dikaji dalam penulisan ini bukan hanya dikaji dengan satu disiplin ilmu saja, namun membutuhkan pendekatan dari disiplin ilmu sosial lainnya.

Pertanian menjadi sector yang penting dan berpotensi, terutama dalam menunjang kehidupan masyarakat transmigran. Pertanian tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan transmigran. Pertanian adalah kegiatan manusia melakukan pembukaan tanah dan menanaminya dengan berbagai jenis tanaman. Pertanian dapat digolongkan menjadi dua jenis, yakni pertanian lahan basah atau sawah dan pertanian lahan kering atau ladang. Pertanian lahan basah adalah usaha tani yang dilakukan pada lahan yang membutuhkan pengairan. Sedangkan, pertanian lahan kering merupakan pertanian yang tidak membutuhkan pengairan, biasanya digunakan untuk usaha tani palawija, sayuran, buah-buahan, dan padi lahan kering.²⁶

Daerah penempatan transmigrasi adalah tempat yang lebih berkembang secara ekonomi dibandingkan dengan tempat asalnya. Pada daerah tujuan, penduduk yang bertambah akan memperluas pasar dan tentunya akan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi atau mempercepat proses pembangunan ekonomi.

²⁶ Tatok Mardikanto, *Pengantar Ilmu Pertanian*, (Surakarta: Pustaka, 2007), hlm. 30.

Sehingga Potensi wilayah yang sebelumnya belum optimal dapat dikembangkan dan dimaksimalkan.²⁷

Dalam kehidupan masyarakat transmigrasi, satu hal yang menjadi perhatian adalah proses integrasi dari para transmigran dalam lingkungan yang baru. Setidaknya terdapat tiga tahapan dalam integrasi yaitu: (1) Akulturasi, yaitu mempelajari sejumlah peranan, norma dan kebiasaan baru serta internalisasi dari pola perilaku yang baru; (2) Penyesuaian pribadi sehingga hanya sedikit atau tidak ada kekacauan individu seperti bunuh diri, kenakalan anak-anak, kejahatan, sakit jiwa; dan (3) Penyimpangan kelembagaan, yaitu para transmigran tidak terkumpul dalam satu sector lapangan ekonomi, politik, atau kebudayaan dan karena itu kehilangan identitasnya. Bukan hanya berinteraksi dengan masyarakat asli setempat saja, mereka juga harus berinteraksi dengan kelompok-kelompok kecil yang sudah ada sebelum terjadi penyerapan.²⁸ Proses interaksi sosial pada masyarakat transmigran akan menghasilkan akulturasi.

Menurut Koentjaraningrat, Akulturasi adalah proses sosial yang terjadi antara sebuah kelompok masyarakat yang dihadapkan dengan kelompok masyarakat yang berbeda, sehingga dari hal ini akan terjadi penyatuan kebudayaan yang berbeda, namun unsur dari masing-masing kebudayaan masih dapat dilihat. Koentjaraningrat mengemukakan bahwa kebudayaan adalah mencakup semua unsur pokok yang sifatnya universal serta perwujudan-perwujudannya yang

²⁷ Setiyo Nugroho & Agus Joko Priyo, "Arus Migrasi Risen di Indonesia Tahun 1980-2010", *Jurnal Bumi Indonesia*, Vol. 6 No. 4, 2017, hlm. 2-3.

²⁸ Clifford Jansen, *Beberapa Aspek Sosiologis dari Migrasi*, (Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Studi Kependudukan Universitas Gadjah Mada, 1979), hlm. 9-10.

meliputi ide, gagasan, nilai-nilai, perbuatan, kegiatan berpola, dan lain sebagainya. Kebudayaan memiliki tujuh unsur yaitu: bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.²⁹ Interaksi Sosial akan menghasilkan akulturasi dan akulturasi menghasilkan perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada setiap lembaga kemasyarakatan yang ada dalam suatu kehidupan masyarakat, hal ini akan mempengaruhi sistem sosial yang ada.³⁰

Di lingkungan barunya, para transmigran harus beradaptasi dengan beberapa hal baik dari penduduk asli dan pendatang. Keduanya akan mengalami asimilasi, seperti dari segi kebudayaan ataupun perilaku dan kebiasaan. Semakin lama masyarakat tersebut tinggal pada suatu daerah, maka membuat mereka semakin besar dalam berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, terutama dalam masyarakat kota. Proses adaptasi memainkan peranan penting ketika dihadapkan pada situasi dan kondisi yang baru. Adaptasi sendiri adalah proses perubahan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Soerjono Soekanto membagi adaptasi menjadi tiga golongan yakni adaptasi terhadap lingkungan eksternal fisik, adaptasi terhadap sosial budaya, dan adaptasi terhadap kondisi kehidupan secara efektif. Dengan demikian, adaptasi diperlukan oleh masyarakat transmigran di

²⁹ Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*, (Jakarta: Aksara Baru, 2006), hlm. 163.

³⁰ Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1981), hlm. 303.

Rejang Lebong agar mereka dapat bertahan hidup di daerah tujuan dengan keberagaman budaya, kondisi sosial, dan lingkungan.³¹

1.7 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan didasarkan pada tahap-tahap dalam metode sejarah yang bertujuan untuk merekonstruksi masa lalu secara factual dan obyektif. Sebuah penelitian sejarah tentu mengharuskan seorang sejarawan untuk menempuh tahapan dalam penelitian sejarah, sehingga didapatkan hasil penelitian dalam bentuk tulisan yang baik dan terbukti kebenarannya. Oleh karena itu, seorang sejarawan harus secara disiplin dalam mempraktekkan metode penelitian sejarah.

Tahapan pertama dari penelitian sejarah adalah pemilihan topik penelitian. Pemilihan topik sendiri dapat didasarkan atas dua hal, yakni *Kedekatan Emosional*³² dan juga *Kedekatan Intelektual*.³³ Dengan telah ditentukannya sebuah topik yang akan dikaji, dilanjutkan dengan pengumpulan sumber-sumber yang relevan dengan topik yang akan dikaji tersebut. Sumber sejarah sendiri terbagi menjadi dua, berdasarkan urutan penyampaianya ada sumber primer dan sumber sekunder, sedangkan berdasarkan jenis bahannya dibagi menjadi dua, sumber

³¹ Soerjono Soekanto, *Teori Sosiologi tentang Perubahan Sosial*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 141.

³² Kedekatan Emosional adalah pemilihan topik berdasar pada keterkaitan emosi seorang peneliti pada objek yang akan diteliti, seperti kedekatan tempat tinggal, dan lain sebagainya. Sehingga peneliti dengan senang hati melakukan penelitiannya.

³³ Kedekatan Intelektual adalah pemilihan topik berdasar pada ilmu pengetahuan yang telah dikuasai oleh peneliti, sehingga penelitian tersebut selain memudahkan peneliti juga akan semakin memperdalam pengetahuannya.

tertulis dan sumber tidak tertulis.³⁴ Sumber yang digunakan penulis berupa sumber wawancara dan sumber tertulis yang berasal dari buku-buku yang dapat menunjang kelancaran penelitian. Sumber-sumber tertulis didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu, Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong, Perpustakaan Universitas Airlangga Kampus B, Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya, dan Perpustakaan Departemen Ilmu Sejarah. Sementara sumber wawancara didapat dari wawancara dengan para transmigran dan penduduk lokal.

Tahap kedua dari penelitian ini adalah kritik sumber. Sumber-sumber yang telah dikumpulkan merupakan sumber yang masih baku, sehingga diperlukan kritik sumber. Kritik sumber sendiri dibagi menjadi dua, yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Kritik dilakukan untuk menyeleksi data-data yang selanjutnya dapat dijadikan sebuah fakta yang konkrit dan digunakan dalam penulisan. Kritik ekstern adalah pengujian keaslian, kredibilitas, palsu, dan relevan tidaknya sumber-sumber tersebut. Kritik intern sendiri berupa pengujian terhadap isi dan kandungan pada sumber yang telah diuji pada kritik ekstern sebelumnya.³⁵

Tahapan selanjutnya adalah Interpretasi yang sering disebut biang subyektivitas. Pada tahapan ini dilakukan analisis pada sumber-sumber tersebut setelah dilakukannya kritik sumber terhadap fakta-fakta yang telah didapat. Fakta-fakta yang telah ditemukan disatukan dan saling dihubungkan, kemudian dari fakta-

³⁴ Kuntowijoyo, *op.cit.*, hlm. 73-74.

³⁵ Louise Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, terjemahan Nugroho Notosantoso (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1985), hlm. 95.

fakta tersebut ditafsirkan, sehingga didapatkan sebuah penafsiran terkait dengan pelaksanaan program transmigrasi di Rejang Lebong pada tahun 1974 sampai dengan 2000.

Tahap terakhir dalam tahapan metode penelitian ini adalah Historiografi. Kegiatan ini dilakukan oleh sejarawan dengan mengerahkan segala kemampuan intelektualnya dalam membuat sebuah deskripsi, narasi, analisis yang kritis, serta sintesis dari fakta-fakta, konsep, teori, dan hipotesis sehingga menghasilkan suatu bentuk penulisan sejarah. Dalam hal ini, aspek kronologis sangat diperhatikan, karena aspek tersebut yang membedakan sebuah kajian sejarah dengan kajian lainnya. Puncak dari semua tahapan yang telah dilalui sebelumnya dirangkai menjadi satu, sehingga menjadi sebuah tulisan sejarah.

1.8 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini, penulis membagi menjadi lima bab, dimana setiap masing-masing bab tersebut memiliki sub-sub bab sebagai penjelas. Hal ini dilakukan agar dapat mempermudah penulis dalam melakukan penulisan dan hasil dari penulisan tersebut lebih terstruktur dan lebih focus kepada topik yang dikaji.

Bab I merupakan bab Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang penelitian, Rumusan Masalah yang dikaji, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Konsep, Metode Penulisan, dan Sistematika Penulisan. Bab ini merupakan pengantar yang mengantarkan pembaca menuju pembahasan utama yang sekaligus dijadikan pedoman penelitian oleh penulis.

Bab II berisikan mengenai program transmigrasi di Indonesia dan gambaran Rejang Lebong sebagai daerah tujuan program transmigrasi. Pada bab ini dijelaskan terlebih dahulu mengenai program kolonisasi yang dilaksanakan di Rejang Lebong. Selanjutnya, pada subbab berikutnya menjelaskan mengenai pelaksanaan transmigrasi di Indonesia pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Bab ini juga menjelaskan tentang kondisi geografis dan keadaan alam di Rejang Lebong, serta dijelaskan pula mengenai penduduk asli setempat yang berkaitan dengan pelaksanaan transmigrasi di Kabupaten Rejang Lebong.

Bab III menjelaskan mengenai pelaksanaan program Transmigrasi di Rejang Lebong pada tahun 1968 hingga tahun 2000. Dalam bab ini menjelaskan pelaksanaan program transmigrasi umum di Kabupaten Rejang Lebong. Selanjutnya menjelaskan tentang program transmigrasi swakarsa yang dilaksanakan di Kabupaten Rejang Lebong serta pelaksanaan Transmigrasi Angkatan Darat (Trans AD). Kemudian, pada bab ini dijelaskan pula mengenai kehidupan para transmigran di Kabupaten Rejang Lebong. Kehidupan transmigran yang dimaksud mencakup kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya setelah tinggal dan menetap di pemukiman transmigrasi.

Bab IV merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta jawaban dari rumusan masalah yang sudah dituliskan sebelumnya.